

PERAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOTA BATU DALAM UPAYA PENYAMPAIAN INFORMASI OTONOMI DAERAH

HERI KUSWANTO

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: heri.kuswanto@gmail.com

Abstrak: Dalam rangka pengelolaan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Kota Batu mengambil alih besar dalam upaya membuat kota Batu sebagai kota muda yang memiliki tata pemerintahan yang baik, bersih dan mendukung self- . Diperlukan adanya sosialisasi terus menerus untuk masyarakat kota Batu sendiri dan juga untuk masyarakat di luar Kota Batu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. sebagai mediator, Dinas Komunikasi Informasi dan Perpustakaan Kota Batu aktif mencari beberapa berita nyata yang selalu baru aktual dengan merepakan komunikasi dua arah. Adapun informasi jenis menjadi daerah garapan Dinas Komunikasi Informasi dan Perpustakaan telah karakter timbale balik 2) Adapun kinerja dinas komunikasi dan informasi Kota Batu cukup tanggap dan memberikan pelayanan yang baik dengan komunikasi informasi yang cukup lengkap.

Kata kunci: Direktur Editorial, Of Kinerja Wartawan

Summary: In order to management of Autonomy Area as execution of Code/Law Number 22 year 1999 about Local Government, Town Stone take charge of big in the effort making Town Stone as town which still young have good governance, cleanness and is self-supporting. Needed by the existence of continuous socialization to Stone urban community alone and also to society outside Batu Town. This research uses method qualitative. Result of this research showed that as mediator, Information Communications Department and Library of BatuTown were active to look for some real news which always new, and actual by applying the two-way communication 2) As for the Department of communication and information Batu Town is quite responsive and provide good service to the communication of information that is sufficiently complete.

Keywords: Editorial Director, Of Journalists' Performance

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Kota Batu mempunyai tanggung jawab besar dalam upaya menjadikan Kota Batu sebagai kota yang masih muda mempunyai Pemerintahan yang baik, bersih dan mandiri. Diperlukan adanya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat Kota Batu sendiri maupun bagi masyarakat di luar Kota Batu. Mengingat selama ini Kota Batu masih banyak dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Malang dan Kota Wisata untuk daerah Malang Khususnya. Selain sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1999, Pemerintah Kota Batu juga harus terus menerus memberikan informasi terhadap perkembangan dan kemajuan apa saja yang telah dicapai oleh Kota Batu sebagai Pemerintah kota yang masih muda. Untuk itu perlu adanya kerja sama dari Pemerintah Kota Batu sendiri dengan masyarakatnya guna mencapai sasaran tersebut. Tentunya hal ini tidaklah mudah dan memerlukan banyak waktu dalam proses sosialisasi serta peran dan kiprah pemerintah Kota

Batu guna mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai keinginan semua masyarakat Kota Batu. Mengingat akan tujuan yang luhur tersebut perlu adanya penjabaran dari Peraturan Pemerintahan Nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dimana perlunya dilakukan langkah-langkah penguatan Ikewenangan, efisiensi, akuntabilitas kinerja kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Sebagai lembaga, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi harus mampu menunjukkan kebijakan daerah dalam hal ini adalah Walikota dalam menjalankan roda Pemerintahan dan pembangunan di Kota Batu. Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kota Batu sebagai salah satu lembaga pemerintahan daerah yang menangani masalah informasi harus pula mampu bersifat komunikatif, sehingga apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Daerah mampu diterima di masyarakat, begitu sebaliknya, apa yang menjadi harapan dan keluhan masyarakat dapat menjadi aspirasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Di sisi lain Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi juga menangani masalah tentang kearsipan dan Teknologi Industri komunikasi yang diharapkan pula mampu menjadi sumber informasi yang aspiratif guna menunjang pembangunan Kota Batu, baik dari Pemerintah Daerah maupun masyarakat Batu pada umumnya. Secara Organisatoris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah / Walikota dalam penyampaian program-program dan kebijakan pembangunan, sedangkan dari masyarakat aspirasi yang di sampaikan bisa (sebaiknya) melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dan juga langsung pada pimpinan pemerintah daerah. Sebagai mediator atau jembatan informasi yang komunikatif, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu aktif untuk mencari dan menyuguhkan berita yang selalu baru, aktual secara profesional, yang pada intinya kinerja yang dilakukan meliputi :

1. Layanan Informasi yang professional;
2. Data Base Kota Batu yang *up to date*;
3. Membantu membangun masyarakat madani yang informative, komunikatif, aspiratif dan kreatif;
4. Membentuk system informasi global yang relatif murah dan mudah dipahami.

Adapun jenis informasi yang menjadi bidang garapan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi bersifat timbal balik, yakni meliputi : Pemerintahan, Pariwisata, Industri dan Perdagangan Pendidikan Adat Budaya yang ada dalam masyarakat, Hotel dan Restoran, Keamanan, Transportasi dan sebagainya yang saling berkaitan dalam pencapaian informasi kepada masyarakat dan khalayak dalam upaya penyampaian informasi agar dapat di terima oleh masyarakat dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan maksud agar dalam proses pencarian makna di balik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya serta tanpa campur tangan dari peneliti. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi di Kota Batu. Dipilihnya kota Batu sebagai lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena beberapa hal yang dimiliki oleh Kota Batu, diantaranya:

- a. Merupakan kota yang masih baru berdiri dengan kondisi masyarakat kota, dimana adanya potensi sumber daya pertanian, industri kecil dan industri menengah serta khususnya yang belum tergalang secara optimal.
- b. Sebagai kota yang masih muda, Kota Batu merupakan wilayah yang tergolong pesat kemajuannya, baik di sector pertanian, industri maupun pariwisata, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan penduduk perkapita yang cukup tinggi.

- c. Demikian juga Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang relatif masih baru pun perlu adanya pelayanan yang memadai dalam upaya pelayanan masyarakat di daerah otonomi, sehingga peran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi turut menentukan langkah dan kiprah para pemimpin maupun masyarakat untuk mengkampanyekan Kota Batu sebagai kota yang otonom.

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisa data kualitatif dari miles dan Huberman (1992) dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Reduksi data Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti, direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari polanya. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan mengkode, menelusuri pola, membuat gugus-gugus dan menulis memorandum teoritis.
- b. Penyajian Data
Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, peta atau uraian narasi.
- c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi
Verifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Sejak wal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola, tema, hubungan pemasamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya untuk dituangkan dalam kesimpulan yang sifatnya masih tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus barulah dapat ditarik kesimpulan yang bersifat “grounded”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Geografis dan Topografis

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru berbentuk sebagai pecahan dari Kabupaten Malang. Sebelumnya, wilayah Kota Batu merupakan bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan I (SSWPI) Malang Utara. Kota dengan luas wilayah sekitar 9.514 Ha, saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pengevaluasian proyek-proyek pembangunan secara mandiri sehingga masyarakat di wilayah tersebut semakin meningkat kesejahteraannya. Jumlah penduduk Kota Batu 159,617 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki 79,542 jiwa (49,83%) dan jumlah penduduk perempuan 80,075 jiwa (50,17%). Di antara tiga kecamatan di Kota Batu, kecamatan Batu memiliki jumlah penduduk terbesar, sedangkan kecamatan junrejo memiliki jumlah penduduk terkecil. Unit Pemerintahan di bawah kota secara langsung adalah Kecamatan. Setiap Kecamatan memiliki beberapa kelurahan/desa, sedangkan setiap kelurahan/desa terbagi habis dalam RT/RW. Data yang akurat mengenai pemerintahan terutama tentang Sumber Daya Manusia yang mengelola Pemerintahan menjadi sesuatu yang sangat penting karena hal tersebut mampu menggambarkan kualitas jalannya Pemerintahan. Secara rinci pembagian Wilayah Pemeritah Kota Batu terdiri atas 3 (tiga) kecamatan; 19 (sembilan belas) desa; 222 Rukun warga (RW) (Kota btau dalam angka, 2001). Berikut adalah jumlah penduduk Kota Batu berdasarkan mata pencahariannya :Pegawai Negeri/TNI : 12.379(jiwa) pegawai perusahaan swasta : 2.959 (jiwa) pedagang/pengusaha : 5.634 (jiwa) petani/peternak : 23.195 (jiwa) lainnya : 56.001(jiwa).

Kota Batu merupakan pemerintah kota yang cukup unik bila dibandingkan dengan Pemerintahan Kabupaten atau kota lainnya di Propinsi Jawa Timur. penduduknya cukup banyak dengan Wilayah sangat luas, sumberdaya alamnya bervariasi, didukung dengan iklim yang relative dingin. Roda pemerintahan cukup lancar dalam rangka merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi derap pembangunan. Pencapaian kemajuan Kota Batu dapat dicermati dengan meningkatnya status pembangunan desa, dimana mulai tahun 1990 semua desa di Kota Batu telah mencapai tingkatan “swasembada”.

Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu

Sebagaimana yang disebutkan dalam perda Kota Batu nomor 19 tahun 2003 yang dimaksud sebagai tata kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Dari definisi diatas maka yang ingin di sampaikan dalam penyajian data adalah memberikan gambaran rinci mengenai penyusunan dan pengaturan berbagai bagian yang berkaitan dengan pengurusan dan pelaksanaan kegiatan organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu. Dalam hal ini pula peran dari Dinas DISHUBKOMINFO sangatlah di perlukan sebagai dinas yang dapat menyampaikan informasi pada masyarakat akan setiap rancangan dan program kerja Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu Dinas tersebut membuatsebut arsip yang mana arsip tersebut bias dipublikasikan baik melalui media elektronik cetak dan perpustakaan daerah.

Disebutkan mengenai fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam pasal 4 Perda nomor 19 / 2003 ini sebagai berikut : a) perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan perencanaan, di bidang informasi, komunikasi, pengelolaan data elektronik, arsip dan perpustakaan; b) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang informasi Komunikasi, Pengelolaan Data Elektronik dan perpustakaan; c) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang Informasi Komunikasi, pengelolaan Data Elektronik, Arsip dan perpustakaan; d) pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Informasi Komunikasi, pengelolaan Data Elektronik Arsip dan perpustakaan; e) pelaksanaan pelayanan umum dan perijinan di bidang Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data Elektronik, Arsip dan perpustakaan; f) pelaksanaan pengevaluasian dan pelporan di bidang Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data Elektronik, Arsip dan perpustakaan; g) pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas dan kerumahtanggaan dinas; h) pengelolaan penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kelompok Jabatan Fungsional, dan yang terakhir adalah sebagai pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Adapun Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, melakukan koordinasi, merumuskan kebijakan, merencanakan, melaksanakan dan mengelola serta mengawasi dan mengendalikan kegiatan teknis di bidang Informasi Komunikasi, Pengelolaan Data Elektronik, Arsip dan Perpustakaan. Meski Kota Batu kaya akan hasil bumi, namun perekonomian Kota Batu justru bersandar pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai penyangga sekitar 45% kegiatan ekonomi daerahnya. Keindahan alam dan berbagai tempat tujuan wisata di sekitar Batu memang menjadi komoditas ekonomi yang mampu menyedot pemasukan tersendiri. Sekitar 24 objek wisata resmi, mulai dari bumi perkemahan, pemandian air dingin dan panas, agrowisata, hingga wisata dirihantaa (paralayang) yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Batu menghadirkan puluhan ribu wisatawan lokal dan mancanegara setiap bulannya.

Peran dan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu Dalam Upaya Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Otonomi Kota Batu

Pemerintah Kota Batu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 dan diresmikan menjadi Pemerintah Otonom pada 17 Oktober 2001, dengan luas wilayah 202.800 km² dihuni oleh 168.155 penduduk yang tersebar luas di tiga kecamatan. Sebagai Kota yang baru dimana masih banyak yang perlu disediakan dan difasilitasi baik suprastruktur maupun infrastruktur oleh Pemerintah Daerah Kota Batu, sehingga peran pemerintah khususnya pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang bisa dikatakan masih baru di Kota Batu belumlah bisa dievaluasi secara keseluruhan karena dalam implementasi perda Kota Batu nomor 19 tahun 2003 ini masih dalam proses penyelenggaraan. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas yang efektif dan efisien serta dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah Otonomi, maka dilakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan alam, kemampuan keuangan daerah, potensi masyarakat, penguatan peningkatan pengawasan serta pelaksanaan analisa fungsi dan organisasi. Untuk itu perlu penetapan kelembagaan dan susunan organisasi di jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi yang disesuaikan dengan beban tugas Pemerintahan serta kebutuhan daerah dituangkan dalam peraturan daerah.

Dalam kaitan tersebut yang dimaksud penyebaran informasi tidak hanya kepada masyarakat Kota Batu khususnya tetapi pada masyarakat sekitar Kota Batu pada umumnya semisal di sekitar Kabupaten Malang, Kediri dan Daerah tetangga Kota Batu. Perlunya sarana ini lebih khusus sebagai sarana sosialisasi bahwa Kota Batu sebagai kota yang sudah berdiri sendiri, karena selama ini orang atau masyarakat mengetahui Kota Batu sebagai bagian dari kabupaten Malang. Hal ini tidaklah mudah mengubah *image* masyarakat yang sudah mengakar, sehingga perlunya sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus. Di sinilah perlunya perda nomor 19 tahun 2003 ini sebagai pedoman dan acuan bagi aparat Pemerintah Kota Batu dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sebagai pelaksanaan dilapangan. Sejauh ini peran dari pemerintah Kota Batu khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat, mengingat waktu yang belum satu tahun sejak disahkannya perda Kota Batu nomor 19 tahun 2003 ini belum member laporan yang menyeluruh karena proses implementasi dari kebijakan mengenai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi tentunya sangat vital bagi perkembangan Kota Batu dan perlunya peningkatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat baik itu mengenai pelayanan penyebaran informasi maupun arsip dan perpustakaan. Dengan adanya pelayanan informasi yang timbale balik kepada masyarakat dan pemerintah, tentunya nanti akan memberi suatu koreksi dan evaluasi yang datang mengalir baik dari masyarakat sebagai pengguna jasa layanan informasi maupun dari pemerintah selaku *provider*. Komunikasi yang timbal balik akan memberikan suatu keselarasan diantara *user* maupun *provider*, yang nantinya akan memberikan koreksi dan evaluasi tersendiri bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu ini.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Batu sudah memenuhi dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Batu pada saat sekarang. Oleh karena itu perlunya ditetapkan Perda No.19 tahun 2003 guna mencapai keselarasan dan keseimbangan akan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Adapun peran dan kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi dalam penyampaian informasi penyelenggaraan otonomi Daerah Kota Batu cukup responsive (tanggap) dan telah berusaha memberikan pelayanan yang baik dengan sarana komunikasi dan informasi yang cukup lengkap : media massa, media elektronik dan sisten *cybernetic* yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Batu.

SARAN

Setelah menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil analisa dan interpretasi data, maka saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Dalam menentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan tentu berpedoman pada aturan yang ada yakni perda, namun dalam hal ini perlu dipertimbangkan akan adanya sumber daya manusia yang berjiwa *enterpreneurship* selain yang profesional, karena Dinas ini banyak harapan dari Pemerintah maupun masyarakat akan bisa menjual Wisata Kota Batu yang sudah banyak dikenal.
2. Dari peran dari Dinas Informasi Komunikasi dan Perpustakaan serta sarana dan fasilitas yang telah disediakan, perlu dikembangkan pula upaya memperluas akses masyarakat untuk mampu menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini harus didukung oleh tingkat keberdayaan masyarakat pengguna khususnya masyarakat Kota Batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 1977. *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek (1 dan 2)*. Bandung: Penerbit Armico.
- Effendy, Onong Uchjana. 1986. *Dimensi-Dimensi Komunikasi*. Bandung: Mandar Jaya.
- _____, 1986. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. Bandung : Remaja Jaya. , 1991. *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hadari, Nawawi. 1998. *Metodelogi Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Hamidi. 2007. *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*. UMM Perss.
- Moleong, Lexy J., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mondry. 2008. *Pemahaman Teori dan Praktik Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin. 2007. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Raja Gratindo Persada.
- Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Widiaserana Indonesia.
- Ruslan, Rosady. 2001. *Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Wiryanto. 2006. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.
- Komunikasi Organisasi karya Arni Muhammad (Bumi Aksara, 2007); R. Wayne Pace, Don F.Faules (Rosdalarya, 2001); H. Rochajat Harun, Ir., M.Ed., Ph.D., (Mandarmaju, 2008), Komunikasi dalam Organisasi karya Gunawan Jiwanto (Pusat Pengembangan Manajemen & Andi Offset, Yogyakarta 1985).*
- E Koswara., 1999. “Otonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat”.
- Moh Kasiram., 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif – Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Abdul Wahab, solichin, 1997, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aloliliweri. *Sosiologi Organisasi*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Bungin, H. M. Burhan. 1992. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Organisasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. 2005.
- Dunn, William N, 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta.

- Hoessein, Bhenyamin, 1998. "Otonomi dan Pemerintahan Daerah: Tinjauan Teoritik". Islamy, Irfan, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik, Bumi Aksara, Jakarta. Ohmae, Kenichi, 1995, The End of The State Dalam R. Siti Zuhro (ed).
- Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW-LIPI, Jakarta.
- Perda Kota Batu No. 6 th 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Kota Batu.
- R. Wane, Pace-Don F. faules, PT.Rosdakarya, Komunikasi Organisasi, Mulyana Neddy Editor, Bandung 2005. PT Rosdakarya
- Samego, Indria, 1998. Otonomi dan Pemerintahan Daerah di Indonesia, dalam R.Siti Zuhro (ed). Pemerintahan Lokal dan Otonomi Daerah di Indonesia, Thailand dan Pakistan. PPW- LIPI, Jakarta.
- Sutopo, HB. 1988. Penelitian Kualitatif. Puslit UNS. Surakarta.
- Santoso, Priyo Budi.1993. Birokrasi Pemerintah Orde Baru, Prespektif Kultural dan struktural. Grafindo Persada. Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Juarsa. Teori Komunikasi. Jakarta: Universitas Terbuka, 2005
- A Mulyana,. 2008. Komunikasi Dalam Organisasi (KDO).
- Mondry. 2006. Komunikasi Media Massa dalam Pembangunan. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No.25 th 1999 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.
- <http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/pemerintahan-nagari-diera-orde-baru-persepsi-aparaturpemerintah-dan-masyrakatterhadap-pemerintahan-nagaridan-otoritas-tradisional/>
- <http://diarcahdiar.blogspot.com/2009/04/komunikasiorganisasipemerintahan.html>
- <http://massofa.wordpress.com/2008/10/15/pengertian-dan-bentuk-analisiskebijakan-publik/>
- <http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html>
- <http://manajemenkomunikasi.blogspot.com/2010/08/teori-komunikasiorganisasi.html>